

Agus Trihartono * Abubakar Eby Hara * Muhammad Iqbal

Sailing in Waves

Indonesia Menuju Negara Maritim



PANDIVA
BUKU

Sailing in Waves

Indonesia Menuju Negara Maritim



Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta,
kecuali mencantumkan identitas pemegang hak cipta.

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Agus Trihartono, Abubakar Eby Hara, Muhammad Iqbal

Sailing in Waves; Indonesia Menuju Negara Maritim/Agus Trihartono, Abubakar Eby Hara, Muhammad Iqbal, editor: Arif Giyanto —Yogyakarta: Pandiva Buku 2019.

x + 128 hal; 18 cm

ISBN: 978-602-5583-05-6

1. Judul

I. Giyanto, Arif

SAILING IN WAVES

Indonesia Menuju Negara Maritim

Penulis:

Agus Trihartono, Abubakar Eby Hara, Muhammad Iqbal

Editor:

Arif Giyanto

Perancang Isi:

D' Woch

Desain Kover:

AndDan Creative

(IG: @anddancreative)

Cetakan Pertama: April 2019



PANDIVA BUKU

MidClass Outlet

Gang Puntodewo No. 164 D, Jaranan, Kanoman,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat, petunjuk serta karunia-Nya kami mampu menyelesaikan buku yang berjudul “Sailing in Waves: Indonesia menuju Negara Maritim”. Buku ini berusaha menunjukkan perjalanan panjang Indonesia menuju Negara Maritim. Indonesia merupakan Negara Kepulauan dan karenanya memiliki keniscayaan untuk memiliki kemampuan mengelola dan mengontrol semua potensi kekayaan laut yang dimilikinya untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara besar dan bermartabat di dunia.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang menjadi penyokong dalam perwujudan buku, antara lain: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia; Universitas Jember khususnya LP2M; Kementerian Luar Negeri RI; Perpustakaan Nasional; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL); CSIS Jakarta; Centre for Research in Social Sciences and Humanities (C-RiSSH); dan para narasumber yang tidak dapat kami sebutkan.

Selain itu, rekan-rekan yang telah memberi bantuan untuk menuangkan catatan-catatan dalam buku ini. Secara khusus, kami berterima kasih kepada Dr. Himawan Bayu Patriadi, Cipto Rizqi Agung Saputro, Fikry Zuledy Pamungkas, dan Yasinta Widya Prameswari.

Terakhir, kalau ada bagian yang baik dari buku ini, tentu saja karena segala bantuan dan dukungan mereka. Namun, kalau ada bagian yang kurang dan tidak lengkap, itu semua sepenuhnya dan semata-mata karena keterbatasan kami.

DAFTAR SINGKATAN

- ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations
- CSIS : Center For Strategic and International Studies
- CS : Copenhagen School
- DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
- ESDM : Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral
- GMF : Global Maritime Fulcrum
- IORA : Indian Ocean Rim Association
- IUUF : Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing

KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KEMENKO	:	Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
KKI	:	Kebijakan Kelautan Indonesia
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OOCC	:	Our Ocean Conference
PBB	:	Persatuan Bangsa-Bangsa
RI	:	Republik Indonesia
TNI AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UU	:	Undang-Undang
UNCLOS	:	United Nations Convention on the Law of the Sea
ZEE	:	Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Singkatan	vii
Daftar Isi	ix
BAB 1. Pendahuluan	2
BAB 2. Konsep Laut: Selayang Pandang ...	10
A. Laut, Bahari, dan Maritim.....	10
B. Negara Kepulauan, Negara Maritim, dan Poros Maritim.....	17
1. Negara Kepulauan.....	17
2. Negara Maritim.....	21
3. Poros Maritim	26
BAB 3. Pemikiran Negara Maritim	32
Perdebatan Dunia Maritim Indonesia.....	46

BAB 4. Evaluasi Poros Maritim.....	54
A. Implementasi Poros Maritim Dunia	55
B. Catatan Kritis terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia dan Poros Maritim Dunia.....	62
BAB 5. Pergeseran dari State Security ke Human Security: Upaya Indonesia Melawan Ancaman IUU Fishing	70
A. Kerangka Teori sekuritisasi	75
B. Negara sebagai Reference Object.....	83
C. Dari Keamanan Negara Menuju Keamanan Lingkungan (Environment Security).....	89
D. Masa Depan yang Belum Jelas.....	93
BAB 6. Penutup	100
Indeks	105
Daftar Pustaka	119
Tentang Penulis	126



Sailing in Waves

BAB 1

PENDAHULUAN

Pemerintahan Joko Widodo, sejak awal menjabat, dalam berbagai kesempatan, berupaya untuk mencanangkan visi dan misi Negara Maritim. Tujuannya, mengembalikan kejayaan maritim Indonesia melalui penguatan kemampuan mengelola sumber laut, mencegah penceroohan perbatasan laut Indonesia oleh orang asing, dan menyadarkan kembali bahwa negara kita adalah Negara Kepulauan.

Konsep itu terus bergulir yang sebelumnya hanya menjadi bahan kampanye hingga menjadi doktrin politik pada saat Jokowi dilantik menjadi Presiden. Aspek utama yang dikembangkan dalam Poros Maritim adalah budaya maritim, sumber

alam maritim, konektivitas, diplomasi maritim dan pengembangan Angkatan Laut.¹

Pada Maret 2017, sebagai langkah lebih lanjut, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan lebih jauh konsep Negara Maritim.

Dalam implementasi di lapangan, berbagai langkah sudah dilakukan untuk mewujudkan visi Negara Maritim. Misalnya, memperbaiki konektivitas yang dikenal sebagai tol laut antar-pulau dengan memperbaiki pelabuhan laut di berbagai kota pelabuhan.

Dengan adanya tol laut, diharapkan lalu lintas melalui perairan akan banyak digunakan dan pengangkutan barang akan lebih mudah serta dapat membantu ketersediaan barang di wilayah yang jauh dari ibu kota Jakarta. Untuk tujuan itu, Indonesia juga menghidupkan kembali Jalur Sutra

1. Iis Gindarsah and Adhi Priamarizki. 2015. 'Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns'. RSIS Policy Report. Available at <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/Indonesias-maritime-doctrine-and-security-concerns/#.W6BNtugzblU>.

yang merupakan jalur perdagangan lama dengan berbagai negara di Asia.

Selanjutnya, Indonesia meningkatkan kerja sama dengan Cina dan negara-Negara Maritim yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)*. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang (UU) yang dapat membantu peningkatan kesejahteraan nelayan.

Dalam konteks Negara Maritim, Pemerintahan Jokowi berusaha menjaga perbatasan laut, dengan menangkap, dan kemudian meledakkan kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia yang dianggap mencuri kekayaan laut Indonesia. Tindakan ini merupakan tindakan yang cukup drastis untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatannya.

Konsep Negara Maritim bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Konsep itu sudah dimulai dari tahun 1957, ketika pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang menuntut pengakuan terhadap wilayah laut Indonesia, dilanjutkan dengan doktrin Negara Kepulauan pada tahun 1960.

Pada tahun 1982, konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diakui oleh dunia internasional, sehingga menjadikan wilayah kedaulatan Indonesia, baik daratan maupun lautan, utuh dalam satu kesatuan, dari Sabang sampai Merauke.

Menyusul kemudian konsep Wawasan Nusantara yang dimulai pada masa Soekarno dan dilanjutkan oleh Soeharto yang menekankan aspek kedaulatan, pertahanan, dan ketahanan nasional Indonesia yang menyeluruh.

Setiap pemerintahan pasca-Orde Baru juga menekankan pentingnya laut dan berasumsi bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan dan Negara Maritim. Pemerintahan BJ Habibie, misalnya, mengeluarkan Deklarasi Bunaken yang mengatakan bahwa laut merupakan peluang, tantangan, dan harapan bagi Indonesia. Sementara Presiden Abdurrahman Wahid menjadi orang pertama yang menunjukkan komitmen terhadap laut dengan membuka Departemen Kelautan dan Perikanan serta membentuk Dewan Kelautan Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mencanangkan program jangka panjang 2005-2025

untuk menjadikan Indonesia Negara Kepulauan yang maju, kuat, dan mandiri dengan membangkitkan kembali budaya bahari.

Namun demikian, walaupun sudah ada perhatian dan komitmen secara tertulis yang cukup jelas dan berlanjut dari pemerintah akan pentingnya laut, dalam sejarahnya, perhatian terhadap kedaulatan laut dan laut sebagai titik tolak kebangkitan atau identitas Indonesia belum dapat dikatakan memadai.

Dalam setiap kesempatan, termasuk dalam kampanye, pembangunan kelautan selalu disebut, walaupun kemudian hanya menjadi basa-basi bahan kampanye. Pembangunan Indonesia dalam kenyataannya masih berorientasi pada pembangunan daratan.

Berdasarkan latar belakang di atas, doktrin Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak menjadi Presiden, merupakan harapan baru bagi kelanjutan kebangkitan Indonesia sebagai Negara Maritim.

Namun, apakah nasib Negara Maritim Jokowi ini akan menjadi sekadar slogan, seperti pemerintahan sebelumnya, atau akan menjadikan maritim sebagai

bagian dari identitas nasional, merupakan masalah utama dalam studi yang akan dibahas. Selanjutnya, perlu juga dibahas, apakah dalam konteks global, konsep Negara Maritim masih cukup relevan, dan bagaimana Indonesia memperjuangkannya.

Buku ini merupakan kajian bersifat eksploratif dan interpretatif. Kami tidak memfokuskan pada upaya mencari hukum sebab-akibat, tetapi lebih melihat bagaimana konsep Negara Maritim untuk waktu yang lama tidak banyak menimbulkan minat banyak orang untuk mendiskusikannya. Setelahnya, merekonstruksi konsep itu dan memproyeksikannya untuk Indonesia ke depan.

Pada buku ini, setidaknya terdapat tujuh bab yang akan dijabarkan lebih lanjut. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, mengapa penulis tertarik untuk menulis buku ini.

Bab kedua merupakan selang pandang mengenai konsep laut. Dalam selang pandang, terdapat tiga hal yang dijabarkan, yakni: konsep laut, bahari, dan maritim. Pada bagian ini, kami menjelaskan konsep Negara Kepulauan, Negara Maritim, dan Poros Maritim.

Pemikiran tentang Negara Maritim dibahas pada bab ketiga. Bab ini mengenai perkembangan gagasan Indonesia sebagai Negara Maritim.

Selanjutnya, pada bab keempat, kami menjelaskan mengenai evaluasi Poros Maritim yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Bagian ini berisi praktik Poros Maritim serta catatan kritis terhadap Poros Maritim dan Kebijakan Kelautan Indonesia.

Bab kelima berisi tentang pergeseran konsep *state security* menuju *human security* dalam cara melihat isu maritim. Pergeseran terjadi. Pada awalnya, cara melihat isu maritim lebih banyak menggunakan perspektif keamanan negara (*state security*), namun belakangan, perspektifnya bergeser menuju sudut pandang keamanan manusia. Pergeseran ini tidak berarti isu dalam keamanan negara itu hilang, namun tekanan yang memberi tempat lebih besar kepada keamanan manusia semakin terbuka.

Pada Bab Penutup, berisi kesimpulan serta beberapa catatan yang nantinya dapat diambil dari bab-bab yang telah disajikan sebelumnya.



Sailing in Waves

BAB 2

KONSEP LAUT: SELAYANG PANDANG

A. Laut, Bahari, dan Maritim

Secara umum, penamaan bahari, maritim, dan kelautan di kalangan masyarakat awam cenderung dianggap sama pemaknaannya, bahkan bisa saling dipertukarkan (*interchangeable*). Namun, jika ditelisik lebih dalam mengenai penamaan bahari, maritim, dan kelautan, sejatinya memiliki makna berbeda. Konsep-konsep itu memiliki makna sendiri-sendiri.

Secara umum, makna konsep bahari adalah nama lain dari laut. Sementara makna konsep maritim menunjukkan adanya kegiatan di laut, misalnya: melakukan perniagaan lewat laut, perdagangan,

pelayaran, mengambil ikan dan sumber-sumber lainnya. Terakhir, makna konsep bahari dan kelautan secara umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut.

Jika dilihat di kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemaknaan mengenai laut disebutkan sebagai ‘kumpulan air asin (dalam jumlah banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi benua atau pulau’.

Akan tetapi, makna kelautan di kamus KBBI terkait perihal yang berhubungan dengan laut. Adanya kata berhubungan ini diartikan bahwa di antara laut dan kelautan terdapat singgungan atau sangkut paut satu sama lain. Singkatnya, istilah kelautan itu lebih kepada kegiatan kelautan serta laut sebagai bentuk fisik (*physical entity/ physical property*).

Dalam ensiklopedia *Britannica*, laut dimaknai sebagai badan air asin yang terus-menerus yang terkandung dalam cekungan besar di permukaan Bumi. Jika dilihat dari luar angkasa, dominasi lautan di Bumi sudah jelas. Lautan marginalnya

menutupi hampir 71 persen permukaan bumi, dengan kedalaman rata-rata 3.688 meter.²

Lebih luas dari sekadar definisi, dalam konteks sejarah dan budaya, laut memiliki makna yang lebih kaya. Secara umum, ada perbedaan antara konsep laut, bahari, dan maritim. Seperti disampaikan oleh sejarawan maritim Profesor Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia, konsep bahari dan maritim itu berbeda, jika dilihat dari kacamata pendekatan ilmu budaya, yaitu dengan terminologi.³

Kata ‘bahari’, menurutnya, berasal dari Bahasa Arab. Selanjutnya, kata ‘bahari’ memiliki kesamaan dengan kata ‘*Al-Bahr*’, yang disebutkan dan menjadi istilah di dalam Al-Quran. Dalam perihal yang datang lebih dahulu, Profesor Zuhdi meyakini bahwa kata ‘bahari’ ini justru lebih dulu muncul menjadi istilah yang dipergunakan untuk menyebut ‘laut’. Dalam konteks sejarah panjang Nusantara, agaknya istilah ‘bahari’ lebih dahulu masuk sebagai bagian dari

2. Britannica. 2018. *Oceans and Seas*. <https://www.britannica.com/topic-browse/Earth-and-Geography/Oceans-and-Seas>. Diakses pada 20 September 2018.

3. Wawancara pada tanggal 26 Mei 2018.

lebih baik dengan rute perdagangan maritim global, serta melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan.

Sebagai penutup, bab ini menjelaskan perkembangan gagasan Indonesia menuju Negara Maritim. Di bagian sebelumnya, telah dijelaskan tentang perbedaan konsep laut, bahari, dan maritim, serta perbedaan antara Negara Kepulauan, Negara Maritim, dan Poros Maritim.

Meskipun Indonesia secara alami adalah Negara Maritim, gagasan tentang Negara Maritim telah melalui perdebatan panjang, sejak kemerdekaan sampai sekarang. Perdebatan itu unik, karena melibatkan berbagai komponen yang memiliki pandangan berbeda tentang apa keadaan maritim dan bagaimana hal itu seharusnya terwujud. Dengan menggunakan studi dokumenter, bab ini mencoba untuk menemukan asal-usul berbagai pandangan tentang Negara Maritim dan sejauh mana mereka telah terwujud.

Dalam proses perdebatan, bagian ini melihat kontradiksi antara kebutuhan untuk menegakkan

kedaulatan maritim di satu sisi, dan ketidakberdayaan untuk mewujudkannya, di sisi lain. Bab ini berpendapat bahwa berdasarkan hasil riset yang dilakukan selama satu tahun, dapat diambil kesimpulan bahwa selama Indonesia tidak dapat mengatasi kontradiksi itu, konsep Negara Maritim tetap menjadi isu politik yang belum terselesaikan.



Sailing in Waves

BAB 3

PEMIKIRAN NEGARA MARITIM

Bagian ini akan membahas perkembangan pandangan tentang pentingnya laut dan maritim bagi Indonesia dari perspektif keamanan. Dalam bab ini, konsep keamanan dibagi menjadi dua bagian, yaitu keamanan tradisional dan non-tradisional.

Keamanan tradisional dikaitkan dengan ancaman bersenjata terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Sementara keamanan non-tradisional berkaitan terutama dengan ancaman yang lebih luas seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan kepada individu.⁵

5. Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Bab ini melihat bahwa kesulitan dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim sebagian terkait dengan pandangan keamanan tradisional yang masih dominan.

Diskusi tentang Indonesia sebagai Negara Maritim dari konsep keamanan sangat penting dalam beberapa hal.

Pertama, pandangan dominan tentang ancaman keamanan memberikan gambaran, bagaimana kebijakan akan diambil. Pandangan ini tidak secara langsung mempengaruhi kebijakan, tetapi dari pandangan dominan yang berkembang, seseorang dapat memahami arah dan orientasi pengambil keputusan pada suatu waktu.

Paradigma keamanan menjadi fokus perhatian bagian ini karena wacana tentang perkembangan dunia maritim Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan tentang keamanan Republik Indonesia. Konsep-konsep penting seperti Negara Kepulauan, Wawasan Nusantara (wawasan kepulauan) dan *Global Maritime Fulcrum* (GMF) memiliki asumsi keamanan di belakangnya.

Indonesia melalui diplomasi dan keterlibatan dengan Tiongkok.

Dalam konteks ini, hanya Departemen Kelautan dan Perikanan yang peduli tentang aspek keamanan non-tradisional, terutama untuk mengelola sumber daya laut sebagai bagian dari ketahanan pangan bagi Indonesia.

Perdebatan Dunia Maritim Indonesia

Temuan di atas menunjukkan bahwa perdebatan tentang dunia maritim Indonesia masih didominasi oleh dan didefinisikan dalam istilah ancaman keamanan militer. Tentu saja, diskusi ini penting untuk wilayah laut Indonesia yang luas.

Namun, lebih dari itu, konsep-konsep seperti Wawasan Nusantara yang menggabungkan dimensi darat dan laut ternyata berkembang lebih ke arah daratan. Strategi pertahanan tetap dirancang untuk mengatasi masalah keamanan internal seperti teroris dan separatis dan ancaman ideologis seperti komunis dan kelompok Islam radikal.

Dengan kata lain, konsep Negara Kepulauan dan Wawasan Nusantara tidak membawa perubahan pada strategi keamanan, terutama dalam menghadapi musuh eksternal yang mengancam kedaulatan laut Indonesia.

Temuan kami menunjukkan bahwa Indonesia memang telah memenangkan kedaulatannya atas laut di UNCLOS. Dalam konteks tatanan internasional, ini merupakan kontribusi yang signifikan.

Seperti yang dinyatakan oleh Oegroseno ini adalah kontribusi Indonesia untuk dunia¹⁶, atau dalam istilah Acharya, Indonesia berkontribusi untuk '*norm subsidiarity*'.¹⁷

Perspektif ini juga menunjukkan bahwa negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia adalah agen aktif dalam memahami konsep-konsep internasional

16. Arif Havas Oegroseno. 2009. *Indonesia's Maritime Boundaries in Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*. Edited by Robert Cribb and Michele Ford.

17. Acharya, Amitav. 2011. 'Norm Subsidiarity and Regional Orders: Sovereignty, Regionalism, and Rule-Making in the Third World'. *International Studies Quarterly* Volume 55 Issue 1.

yang diperkenalkan oleh negara-negara Barat. Indonesia menyesuaikan aspek kedaulatan dengan kebutuhan geografisnya dan berusaha untuk mendapatkannya di dunia.

Dengan UNCLOS, Indonesia mengundang tetangga untuk mematuhi peraturan internasional, karena, menurut Oegroseno, jika kita tidak mengacu pada aturan ini, di mana lagi di negara masyarakat modern dapat berhubungan dengan baik hari ini? Negara-negara Barat dapat menjadi referensi dan contoh untuk memecahkan masalah laut.

Namun, paradigma keamanan dan kedaulatan terus berubah. Jika negara-negara dunia ketiga, terutama mereka yang menjadi anggota ASEAN, masih sangat menekankan prinsip ancaman militer dan kedaulatan teritorial, seperti non-intervensi pada urusan negara lain, dunia internasional mulai membuka diri dengan melihat kedaulatan yang lebih fleksibel. Hal ini didorong oleh kasus kemiskinan dan kelaparan yang membutuhkan intervensi kemanusiaan. Demikian juga, kasus penyiksaan atau pembantaian warga oleh suatu negara menimbulkan

tuntutan suatu negara untuk memenuhi tanggung jawabnya, melindungi.

Dalam analisis kami, lambatnya perhatian pada potensi laut adalah karena Indonesia masih terpaku pada definisi tradisional kedaulatan yang menekankan prinsip non-intervensi, meskipun dunia telah berubah.

Jadi, ketika kita memperoleh kedaulatan laut, beberapa orang menganggap perjuangan telah berakhir, dan kita bisa lebih tenang dan merasa aman, karena kawasan itu dilindungi secara hukum dan diakui oleh masyarakat internasional. Perasaan tenang tersebut diperlukan untuk memungkinkan pengembangan berlanjut.

Namun, pembangunan, dalam hal ini, tampaknya dilakukan dalam konteks pengembangan lahan dari sumber daya alam, seperti pertambangan dan kayu, serta mengabaikan potensi laut. Demikian juga, pertanian adalah perhatian dengan pertimbangan, untuk memajukan desa-desa Indonesia yang tertinggal.

Dalam studi lebih lanjut, kita melihat bahwa visi dan identitas maritim Indonesia yang lemah juga terkait dengan bagaimana pemerintah memahami keamanan nasional.

Pada berbagai konsep, keamanan sering didefinisikan sebagai keamanan tradisional dan non-tradisional. Keamanan tradisional didefinisikan sebagai keamanan dari ancaman militer dan konflik bersenjata lainnya terhadap negara dan oleh karena itu negara adalah sentris.

Sementara keamanan non-tradisional adalah perluasan ancaman keamanan yang meliputi ancaman non-militer, seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik, yang diarahkan tidak hanya pada negara, tetapi juga pada individu.

Di Indonesia, ancaman terhadap otoritas negara, sejauh ini berasal dari dalam negeri. Beberapa berasal dari daerah yang ingin mandiri atau untuk mendapatkan perawatan pembangunan yang lebih adil.

Para pemberontak juga datang dari tanah, bukan dari laut, dan karena itu, Indonesia mengembangkan

Angkatan Darat sebagai pilar pertahanan utama serta mengabaikan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dianggap tidak memiliki ancaman, karena operasi mereka tidak di darat.

Meskipun GMF telah dinyatakan, bisnis, seperti biasa, berlaku untuk kegiatan kelautan. Bahkan di sektor pertahanan, Angkatan Laut Indonesia enggan memainkan peran dominan di mana mereka harus berkembang sebagai bagian dari GMF.

Istilah saat ini, laut tetap merupakan halaman belakang, bukan halaman depan. Dalam GMF, pandangan keamanan tradisional dalam menjaga kedaulatan laut juga terjadi dengan tenggelamnya kapal-kapal asing, termasuk bentrokan dengan penjaga pantai Cina di Laut Natuna. Orang-orang sangat menghargai langkah Presiden Jokowi untuk menantang ancaman Cina di wilayah itu dan melihatnya sebagai keberanian untuk menegakkan kedaulatan Indonesia dari setiap ancaman asing.

Singkatnya, paradigma keamanan tradisional tetap menjadi pandangan dominan di Indonesia dalam melihat dunia maritim.



Sailing in Waves

BAB 4

EVALUASI POROS MARITIM

Bab ini membahas evaluasi gagasan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. Gagasan tersebut dimulai sejak tahun 2014, pada awal masa pemerintahan Joko Widodo, kemudian diikuti oleh dikeluarkannya Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) pada tahun 2017.

Secara khusus, bab ini akan menjelaskan mengenai praktik dan evaluasi terhadap Poros Maritim serta KKI. Oleh sebab itu, kami akan memaparkan secara singkat, kritik-kritik terhadap Poros Maritim dan KKI Pemerintah Indonesia.

A. Implementasi Poros Maritim Dunia

Upaya menjabarkan konsep Poros Maritim dunia mulai dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014. Namun, tampaknya fokus lebih banyak diberikan kepada aspek yang lebih mikro dari konsep yang tampak besar dari Poros Maritim dunia. Pembangunan konektivitas dan pemberantasan *IUU Fishing* justru lebih banyak terlihat daripada glorifikasi konsep besar GMF.

Poros Maritim Dunia yang berkembang, hingga buku ini ditulis, memiliki tujuh pilar yang merupakan bagian dari gagasan Poros Maritim Dunia.

Awalnya, Presiden Joko Widodo mencanangkan Lima Pilar Poros Maritim Dunia, yakni budaya maritim, pembangunan sumber daya, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, diplomasi maritim, serta pertahanan.

Konsep ini kemudian berkembang menjadi Tujuh Pilar, yaitu pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di

namun di lapangan, justru saling berkompetisi akibat munculnya ego sektoral.

Pada praktiknya, ego sektoral adalah nyata, khususnya yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang bersinggungan untuk mengurus kelautan.²⁴

Mengenai ego sektoral, sebenarnya dapat diatasi, yakni memanfaatkan teknologi, dengan membangun sistem terintegrasi. Sayangnya, sampai saat ini, integrasi seperti ini masih belum menjadi langkah prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Catatan kritis di atas merupakan bagian dari evaluasi mengenai Poros Maritim Dunia dan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Tentunya untuk mencapai Negara Maritim Indonesia yang kuat, pemikiran, kebijakan, dan implementasi dari GMF serta KKI memiliki potensi besar untuk terus diperbaiki.

24. Wawancara pada tanggal 26 Mei 2018.



Sailing in Waves

BAB 5

PERGESERAN DARI STATE SECURITY KE HUMAN SECURITY:

UPAYA INDONESIA MELAWAN ANCAMAN IUU FISHING

Bagian ini membahas usaha Indonesia untuk menangani *IUU Fishing* yang menjadi ancaman bagi keamanan maritim Indonesia yang dijalankan semasa Presiden Joko Widodo. Ancaman itu sudah berlangsung lama dan sangat merugikan Indonesia, karena banyaknya ikan yang dicuri oleh kapal-kapal asing ilegal dan kerusakan lingkungan laut, akibat kegiatan pencurian yang masif.

Namun, ancaman tersebut tidak ditangani dengan keras dan tegas oleh pemerintahan sebelumnya, walaupun hal itu adalah hak yang dimiliki Indonesia, karena mereka melanggar wilayah Indonesia dan

negeri ini memiliki peraturan perundangan untuk mengatasinya.

Berbeda dengan pemerintah sebelumnya, Presiden Jokowi yang mencanangkan Indonesia sebagai GMF, mengambil tindakan keras dengan melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal yang terlibat *IUU Fishing*.

Penenggelaman kapal-kapal ini dianggap sebagai kebijakan yang ekstrem, karena berbeda dari cara penyelesaian sebelumnya yang dianggap normal melalui penangkapan dan perundingan.

Kebijakan menenggelamkan kapal-kapal tersebut, karenanya, memerlukan apa yang disebut proses sekuritisasi dengan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan khalayak umum akan ancaman dari bahaya tersebut.

Penerimaan acara-cara tegas dan keras memungkinkan dilakukannya tindakan secara sah, mendesak, dan diterima secara umum oleh masyarakat luas.

Dalam konteks itu, kami ingin membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan melihat proses

tetap memiliki signifikansi dan keterkaitan secara saksama.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa kreativitas untuk menemukan signifikansi dan keterkaitan isu keamanan, dalam taraf tertentu, berguna untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia.

Tanpa kreatifitas dalam mengaitkan kepentingan nasional dalam hal menjaga laut Indonesia maka tidak mustahil semua langkah Indonesia bisa kehilangan konteks dan rasionalitasnya.

Menemukan konteks dan *rationale* yang tepat (atau dapat diterima bagi kalangan domestik maupun internasional) memungkinkan semua langkah akan mendapatkan dukungan luas. Menggeser isu keamanan bisa jadi salah satu upaya ke arah itu.



Sailing in Waves

BAB 6

PENUTUP

Pemerintahan Presiden Joko Widodo men-canangkan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia pada tahun 2014. Dengan kebijakan ini, Indonesia ingin menjadikan laut sebagai pusat kegiatan (*center for gravity*) dari pembangunan dan strategi politik, ekonomi, dan budaya Indonesia ke depan.

Untuk mencapai hal itu, Pemerintah Indone-sia mengeluarkan lima pilar Poros Maritim dunia yang kemudian dikembangkan menjadi tujuh pilar. Ketujuh pilar itu adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan

keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan kelautan; ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.

Sebagai langkah awal, Poros Maritim Dunia dapat dikatakan merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Poros Maritim Dunia merupakan kelanjutan dari ide tentang Negara Kepulauan (*archipelagic state*) yang sudah diakui PBB melalui UNCLOS.

Sebagai Negara Kepulauan, kedaulatan Indonesia atas laut yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia diakui internasional. Konsep Negara Kepulauan memperkuat konsep wawasan Nusantara di mana tanah, laut, dan udara merupakan satu kesatuan kedaulatan Indonesia.

Tetapi, perjuangan untuk menjadi Poros Maritim Dunia mempunyai banyak tantangan. Indonesia pertama kali perlu mengembalikan laut sebagai identitas nasional yang kini banyak dilupakan, karena orientasi pembangunan untuk waktu yang lama adalah ke daratan.

Padahal, pada masa lalu, Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari di mana para pelautnya dikenal hampir di seluruh dunia. Perubahan identitas ini penting, karena identitas menginformasikan arah perkembangan selanjutnya dari negara Indonesia.

Pengabaian terhadap laut kemudian menyebabkan pengurusan terhadap laut menjadi terbengkalai. Untuk waktu yang lama, bukan saja kedaulatan Indonesia dilanggar, tetapi juga kekayaan laut itu dicuri oleh kapal-kapal asing.

Penjagaan yang rapuh dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal-kapal yang terlibat dalam *IUU Fishing*.

Proses penenggelaman kapal-kapal itu dilakukan melalui proses sekuritisasi yang cukup masif, sehingga secara umum, mendapat penerimaan luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, tindakan penenggelaman kapal *IUU Fishing*

tanpa pandang bulu telah menimbulkan simpati, terutama karena keberanian Indonesia dalam berhadapan dengan kapal-kapal Cina yang menjarah ikan Indonesia. Di luar negeri, tindakan penenggelaman kapal-kapal tersebut juga disambut baik, karena memang sejak lama, banyak negara harus berhadapan dengan kapal-kapal pencuri ikan yang merugikan negara secara masif.

Tantangan berikutnya dari Poros Maritim Dunia adalah pembangunan prasana pelabuhan dan kapal-kapal yang memadai. Salah satu program yang populer dalam hal ini adalah pengembangan tol laut.

Melalui tol laut, dibangunlah pelabuhan-pelabuhan yang dapat menghubungkan berbagai pulau di Indonesia secara lebih mudah dan cepat. Kerja sama ekonomi dengan pihak luar juga dilakukan untuk mencapai tujuan percepatan pembangunan tol laut.

Masalah yang tidak kurang pentingnya adalah masalah sumber daya manusia serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan Poros Maritim Dunia lebih lanjut.

Pada saat ini, masalah itu belum begitu mencuat, terutama karena adanya tantangan yang lebih besar, yaitu kedaulatan laut dan sumber daya laut Indonesia. Namun, dalam jangka panjang, peranan yang lebih jelas dari masing-masing sektor yang terlibat dalam Poros Maritim Dunia sangat diperlukan dengan koordinasi yang lebih baik. Kebijakan pusat dan daerah pun memerlukan sinergi yang lebih baik.

Secara umum, seperti kami uraikan dalam buku ini, Poros Maritim Dunia telah membuka kembali mata kita akan kekayaan negeri yang terbengkalai dan kebanggaan sebagai negara bahari.

Pencanangan Poros Maritim Dunia merupakan titik tolak kesadaran baru. Berbagai diskusi, seminar, publikasi, bahkan lembaga-lembaga studi bermunculan untuk mengantisipasi maupun merancang arah Poros Maritim Dunia.

Terlepas dari berbagai kritik, Poros Maritim Dunia perlu terus dikembangkan, sehingga potensi laut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

INDEKS

A

Acharya · 41, 69, 70, 78, 98

agresi militer · 18

Al-Bahr · 12

ancaman keamanan · 29, 31, 40, 43, 64, 67,
69, 70, 71

ancaman keamanan militer · 31, 40

Angkatan Laut · iv, v, 2, 38, 40, 44, 101

Angkatan Udara · 44

archipelagic state · 17, 87, 100

aspek kemampuan · 21

audience · 66, 67, 71, 72, 75, 80, 81, 82, 83,
84

Australia · 32, 36, 102

authoritative. · 68

B

bahari · 7, 10, 11, 13, 14, 26, 88, 90

Bangsa Maritim · 20

Belanda · 18, 22, 34

BJ Habibie · 4

budaya bahari · 5, 48, 87

budaya maritim · 2, 48

buku putih · 25

C

catatan kritis · 7, 55, 57

catatan kritis terhadap Poros Maritim · 7

Chairul Saleh · 34

Cina · 3, 39, 44, 76, 89

Copenhagen School · v, 64, 65, 71, 72, 77, 82

CSIS · v, 15, 39, 52, 58, 100

D

daratan · 4, 5, 18, 40, 80, 88

Deklarasi Bunaken · 4

Deklarasi Djuanda · 4, 19, 33

Denmark · 21

Departemen Kelautan dan Perikanan · 5, 40

desekuritisasi · 69, 70, 77

deterrence · 75

Dewan Kelautan Indonesia · 5

dimensi ekonomis · 26

dimensi strategis · 26

diplomasi maritim · 2, 48

Doktrin Djuanda · 34

doktrin negara kepulauan · 4

doktrin politik · 2

Dr. Arif Havas Oegroseno · 15

Dr. Dedi Supriadi · 49, 58, 101
Dr. Havas Oegroseno · 54
Dr. Rifqi Muna · 51, 53, 57
Dr. Shafiah Muhibat · 15, 52, 55
drone · 74
dukungan internasional · 53

E

ego sektoral · 59
ekspansionis · 33
environmental security · 64
ESDM · v, 58
evaluasi Poros Maritim · 7
EVALUASI POROS MARITIM · 47

F

Filipina · 36
fisheries crimes · 51, 52
Food Security · 49
Freddy Numberi · 76

G

Global Maritime Fulcrum · v, 24, 30, 39, 98, 100

GMF · v, 24, 25, 26, 30, 39, 44, 47, 51, 54, 57, 60, 62, 84

gugusan kepulauan · 17

H

halaman belakang · 44

halaman depan · 25, 30, 44

hasil illegal fishing · 54

Hindia Belanda · 18

human security · 7, 64, 70, 78

I

Indian Ocean Rim Association (IORA). · 3

individual security · 65, 84

inkonsistensi · 55, 57

intervensi kemanusiaan. · 42

Irian Barat · 34

isu keamanan · 64, 66, 71, 81, 85

IUU Fishing · iii, 49, 50, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 89

J

jalur sutra · 3

Jepang · 32, 102

Joko Widodo · 2, 6, 24, 25, 26, 47, 51, 54, 62, 87

Jokowi · 2, 3, 6, 39, 44, 62, 64, 73, 74, 76, 84, 100

K

kampanye · 2, 5, 25, 73

keamanan manusia · 7, 71

keamanan negara · 7

keamanan non-tradisional · 29, 39, 40, 43

Keamanan tradisional · 29, 43

Kebijakan Kelautan Indonesia · 7, 58, 60

Kebijakan Kelautan Indonesia · iii, v, 25, 47, 54, 55

kedaulatan · 4, 5, 27, 29, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 63, 64, 66, 73, 76, 79, 84, 88, 90

kedaulatan Indonesia · 4, 34, 39, 45, 49, 73, 88

kedaulatan negara · 84

kejayaan maritim · 2, 24

kekayaan hayati · 80

kelautan · 5, 7, 10, 15, 21, 34, 37, 44, 48, 54, 58, 59, 81, 87

kemampuan mengelola · iv, 2, 21, 22, 24

Kementerian Kelautan · v, 37, 50

Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Kemaritiman RI · 25

Kementrian Perhubungan · 58

kepemilikan wilayah · 21

kepentingan negara · 22

kesatuan geografi dan politik · 17

ketahanan nasional · 4

ketahanan pangan · 40
KKI · v, 25, 47, 55, 56, 57, 58, 60
KKP · v, 49, 50, 51, 58
konektivitas · 2, 3, 26, 47, 48, 54
Kongres Maritim II · 19
konsep bahari · 11, 13
konsep Indo-Pasifik · 23
konsep keamanan · 29, 33
konsep laut · 7, 11, 14, 16, 26
konsep negara maritim · 2, 6, 23, 27
konsep Wawasan Nusantara · 4, 36
kontradiksi · 27
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) · 16
Korea · 32
L
lautan · 4, 11, 21, 32
M

Malaysia · 33, 36

marinus · 12, 14

maritim · 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 40, 43, 45, 47, 58, 62, 64, 78,
80, 84, 87, 103

masalah keamanan internal · 40

media darling · 76

meledakkan kapal-kapal asing · 3

mencuri kekayaan laut · 3

menjaga keamanan · 55, 63

Menteri Susi Pudjiastuti · 50, 51, 75

Mochtar Kusumaatmadja · 34, 35

modernisasi angkatan laut · 26

moratorium penangkapan ikan · 49, 50

motivasi · 72, 73, 83, 84

Muhammad Yamin · 33

N

National Ocean Policy · 55

negara kepulauan · iv, 2, 4, 7, 16, 22, 25, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 87

Negara Kepulauan · iii, 5, 16, 17, 25, 32, 36, 88

negara maritim · iv, 2, 3, 4, 6, 7, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32

Negara Maritim · 22

nelayan · 3, 49, 50, 52, 79

norm subsidiarity · 41

O

Orde Baru · 4, 37

Ordonansi Hindia Belanda · 18

Our Ocean Conference · v, 80

P

Paradigma dominan · 31

Paradigma keamanan · 30

pelabuhan · 3, 26, 48, 89

Pembangunan infrastruktur · 48

pemberantasan IUU Fishing · 47, 54

pemersatu · 26

pemisah · 18, 26

pencurian ikan · 49, 74, 76, 80

penenggelaman kapal · 50, 52, 63, 64, 65, 75, 79, 82, 83, 89

Penenggelaman kapal · 63

perairan Indonesia · 3, 52, 54

perbatasan laut · 2, 3, 25, 75

Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja · 18

Perdebatan Dunia Maritim Indonesia · iii, 40

perkembangan maritim Indonesia · 30

perkembangan pandangan · 29, 30

perlindungan lingkungan laut · 48, 80, 87

pertahanan · 4, 26, 30, 36, 38, 40, 44, 48, 87

Poros Maritim · 2, 7, 27, 47, 48, 55, 57, 58, 59

Poros Maritim · 24

Poros Maritim Dunia · iii, 5, 39, 47, 54, 87, 88, 89, 90, 100

Posisi kekuasaan · 68
post-colonial state · 69
potensi yang dimiliki Indonesia · 23
praktik dan evaluasi · 47
praktik Poros Maritim · 7
Presiden Abdurrahman Wahid · 5, 37
Presiden Megawati · 37
Presiden Soeharto · 33, 36
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono · 5, 37
Profesor Daniel M. Rasyid · 39, 101
Profesor Hasjim Djalal · 19
Profesor Susanto Zuhdi · 11, 59, 100
proses sekuritisasi · 63, 69, 71, 72, 73, 83, 84,
89
R
Ralf Emmers · 72
referent object · 64, 65, 67
reformasi politik · 37

S

Securitizing actors · 67

securitizing move · 73

Sekuritisasi · 70, 81, 82, 83

Singapura · 21, 32, 36

single fighter · 53

Soekarno · 36

speech act · 67, 71, 79

state security · 7, 70, 71, 78

strategi keamanan · 41

superioritas Angkatan Darat · 38

T

Taiwan · 32, 102

tantangan · 4, 31, 35, 54, 55, 88, 90

teori sekuritisasi · 65

TNI AL · v, 26, 76

tol laut · 3, 48, 89

transnational crime · 81

tujuh pilar · 48, 55

U

UNCLOS · v, 32, 35, 36, 41, 88

W

Wawasan Nusantara · 30, 36, 40, 100

Z

Zona Ekonomi Eksklusif · v, 4

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, Amitav.(2011). *Norm Subsidiarity and Regional Orders: Sovereignty, Regionalism, and Rule-Making in the Third World*. International Studies Quarterly, Volume 55, Issue 1.
- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316756768.
- Adhuri, Dedi Supriadi, Amorisa Wirarti dan Angga Bagus Bismoko. (2015). *Interseksi Budaya dan Peradaban Negara-negara di Samudera Hindia: Perspektif Indonesia*. Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Vol. 41 No. 2

Desember. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Press.

Agastia, I.G.B. Dharma. (2017). *3 Years Later, Where Is Indonesia's 'Global Maritime Fulcrum'?*. The Diplomat November 22. Available at <https://thediplomat.com/2017/11/3-years-later-where-is-Indonesias-global-maritime-fulcrum/> Accessed 20 June 2018.

Arif, Muhammad and Kurniawan, Yandry. (2017), *Strategic Culture and Indonesian Maritime Security*. Asia & the Pacific Policy Studies, vol. 5, no. 1, pp. 77–89.

Arsana, I Made Andi. (2007). *Batas Maritim Antar-negara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Balzacq, T. (2015). *The 'Essence' of securitization: Theory, ideal type, and a sociological science of security*. International Relations, 29(1), 103–113. <https://doi.org/10.1177/0047117814526606b>.

Britannica. 2018. *Oceans and Seas*. <https://www.britannica.com/topic-browse/Earth-and-Geography/Oceans-and-Seas>. Diakses pada 20 September 2018.

- Butcher, John G. (2009). *Becoming an Archipelagic State: The Juanda Declaration Of 1957 And The 'Struggle' To Gain International Recognition Of The Archipelagic Principle in Indonesia Beyond The Water's Edge: Managing An Archipelagic State* / edited by Robert Cribb and Michele Ford.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, CO: Lynne Rienner.
- Checkel, Jeffrey T., (2017). *Methods in Constructivist Approaches to International Security*, *Simons Papers in Security and Development*. No. 55/2017, School for International Studies, Simon Fraser University, Vancouver, January.
- Djalal, Hasjim. (1997). *Respons dan Kebijakan Indonesia terhadap Dinamika Politik dan Keamanan Internasional*. *Studia Politika* 2. Jakarta: Yayasan Insan Politika dan Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI.
- Djalal, Hasjim. (2003). *Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned*. Jakarta: The Habibie Center.

- Djalal, Hasjim. (2009). *Mengelola Potensi Laut Indonesia*. Jurnal Luar Negeri, Vol. 26 No. 3 September-Desember. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri RI.
- Gindarsah, Iis and Priamarizki, Adhi. (2015). *Indonesia's Maritime Doctrine and Security Concerns*. RSIS Policy Report. Available at <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/Indonesias-maritime-doctrine-and-security-concerns/#.W6BNtugzbiU>.
- Hansen, Lene, (2006). *Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War*. London: Routledge. xxiii + 259 pp. ISBN 0415326532. *Journal of Peace Research*, 44(5), 638–638. <https://doi.org/10.1177/002234330704440050709>.
- Jackson, Robert and Sorensen, Georg. (2006). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. 3rd edition. Oxford university press. Chapter 6 Social Constructivism.
- Latifah and Dinda Larasati. (2017). *Tantangan Internal dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai*

Poros Maritim Dunia. Jurnal Hubungan Internasional, X(2) Juli - Desember.

Lemhanas. (1982). *Pokok-Pokok Pengertian dan Sejarah Perkembangan Wawasan Nusantara*. di Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2, (Jakarta Lemhannas), pp. viii-xviii.

Marzuki, Keoni Indrabayu. (2018). *The Meaning of Indonesia's Global Maritime Fulcrum*, *Pacific Forum* 1 4A. Available at https://csis-rod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180222_PacNet_14A.pdf?BquPIFV7tvtoHwrfFgcb1JoYQ_jGABZE.

Oegroseno, Arif Havas. (2009). *Indonesia's Maritime Boundaries in Indonesia beyond the water's edge: managing an archipelagic state* / edited by Robert Cribb and Michele Ford.

Pane, Nina. (2015). *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-Atmadja* (Jakarta: Kompas).

Sambhi, Natalie. (2015). *Jokowi's 'Global Maritime Axis: Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?'*. *Security Challenges*, Vol. 11, No. 2, pp. 39-55. Available at <https://www.regionalsecurity.org.au/>

resources/Documents/SC%2011-2%20SAMBHI.pdf.

Trihartono, Agus. (2016). *Diplomasi (Megafon) di Natuna: Langkah Kuda Presiden Jokowi*. CNN Indonesia. Available at <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20160701102959-21-142315/diplomasi--megafon--di-natuna-langkah-kuda-presiden-jokowi>.

Waever, Ole. (1995). *Securitisation and Desuritisation*, in Ronny D. Lipschutz, ed., 'On Security: 46-87. New York: Columbia University Press.

Wawancara

Wawancara dengan Profesor Susanto Zuhdi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 26 Mei 2018.

Wawancara dengan Shafiah Muhibat dari CSIS, 22 Mei 2018.

Wawancara dengan Hasjim Djalal, 23 Mei 2018.

Wawancara Anonymous dengan Perwira Angkatan Laut, 2018.

Wawancara dengan Profesor Daniel M. Rasyid.

Wawancara dengan Dr. Dedi Supriadi dari LIPI, 21 Mei 2018.

Wawancara dengan Rifqi Muna dari LIPI dan Staf Ahli Menteri Sekretaris Kabinet [Pratikno], 25 Mei 2018.

TENTANG PENULIS

Agus Trihartono adalah Staf Pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia. Ia pernah menjadi peneliti di Ritsumeikan Global Innovation Research Organization (R-GIRO), Ritsumeikan University, Jepang. Saat ini, ia adalah peneliti di Pusat Studi Ilmu Sosial dan Humaniora [C-RiSSH] dan Institute for Maritime Studies [IMaS] Universitas Jember, dan Pilar Data Research and Consulting (Pilar Data Indonesia). Minat studinya adalah Regionalisme Asia, Human Security, Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi, Soft Power, Keamanan Maritim, dan Polling Politik. Ia menyelesaikan program Doktor dan Magisternya di

Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang.

Abubakar Eby Hara adalah Staf Pengajar di Departemen Hubungan Internasional, Universitas Jember, Indonesia. Saat ini, ia adalah peneliti di Pusat Studi Ilmu Sosial dan Humaniora [C-RiSSH], Universitas Jember. Ia menyelesaikan program Doktor dan Magisternya di The Research School, Pacific and Asian Studies (RSPAS), ANU, Canberra, Australia. Pernah menjadi peneliti tamu di berbagai lembaga dan universitas seperti The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) (Singapore), CSEAS Kyoto University (Jepang), East-West Center, Washington D.C. (Amerika Serikat), Center for Southeast Asian Studies - National Sun Yat-sen University (Taiwan), dan Sydney University (Australia). Bidang minatnya termasuk kerja sama ASEAN, Kebijakan Luar Negeri Indonesia, hubungan internasional dan demokrasi di Asia Tenggara. Dia telah menerbitkan artikel di jurnal seperti *Japanese Journal of Political Science* dan *Contemporary Southeast Asia*.

Muhammad Iqbal adalah Dosen Senior di Departemen Hubungan Internasional, Universitas

Jember, Indonesia. Saat ini, ia adalah peneliti di Institute for Maritime Studies [IMaS], Universitas Jember. Ia menyelesaikan program Doktor dan Magister di Departemen Komunikasi, Universitas Indonesia, Jakarta. Bidang minatnya termasuk politik Indonesia, studi media, komunikasi politik, demokrasi, dan studi maritim. Dia telah menerbitkan artikel di beberapa jurnal dan aktif terlibat dalam konferensi internasional.